

SURAT-SURAT SULTAN BUTON, DAYYAN ASRARUDDIN DAN KAIMUDDIN I, KOLEKSI UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN, BELANDA

*Suryadi**

ABSTRACT

SURAT-SURAT SULTAN BUTON, DAYYAN ASRARUDDIN DAN KAIMUDDIN I, KOLEKSI UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN, BELANDA).

Key words : surat-surat, manuskrip Melayu klasik, sejarah, bahasa Melayu, Sultan Dayyan Asraruddin, Sultan Kaimuddin I, kolonialisme, The Dutch East Indies, Buton

PENGANTAR

Salah satu jenis naskah Buton yang cukup menonjol adalah surat-surat kerajaan (*royal letters*). Surat-surat tersebut dikirimkan oleh raja-raja Buton kepada sesama penguasa lokal di bagian timur Nusantara atau kepada Kompeni Belanda. Dalam *Katalog Naskah Buton* koleksi Abdul Mulku Zahari susunan Achadiati Ikram dkk. (2002) tercatat 97 naskah Buton yang digolongkan ke dalam jenis surat. Banyaknya surat resmi raja-raja Buton itu merefleksikan eksistensi Kerajaan Buton di masa lalu walaupun VOC, setidaknya pada mulanya, menganggap kerajaan itu tidak begitu penting karena miskinnya (Kielstra, 1910:309).

Namun demikian, naskah surat-surat raja Buton yang cukup banyak itu belum mendapat perhatian maksimal secara akademis.³ Studi terhadap surat-surat raja Buton antara lain telah dilakukan oleh Zahari (1977), Gallop (2002: part 1, vol. I, 127, 200-1; part 2, vol. III, 497-500), Mu'jizah (2004), Pudjiastuti (2004), dan Suryadi (2005, 2006). Tampaknya, studi mengenai surat-surat raja Buton cukup lama terabaikan setelah untuk pertama kalinya mendapat perhatian W.G. Shellabear pada akhir abad ke-19. Shellabear (1898) membahas surat seorang *kapitalao* (kapiten laut) Kerajaan Buton yang ditulis pada abad ke-17 (kira-kira 1667), pada masa pemerintahan Sultan Buton

* Staf Pengajar pada Departemen Asia Tenggara dan Oseania (*Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost Azië en Oceanië*) dan kandidat doktor pada School of Asian, African, and Amerindian Studies (CNWS), Leiden University, Belanda.

ke-10, Sultan Adilik Rahim (atau La Limbata atau Oputa Mosabuna) yang berkuasa tahun 1664-1669. Surat itu, bersama sejumlah surat lain dari raja-raja Melayu yang dikirimkan kepada penguasa kolonial Belanda dan Inggris pada abad ke-17, sekarang tersimpan di Bodleian Library di Oxford, Inggris (Ab Karim 1994:49).

Surat-surat Melayu klasik adalah objek studi yang sudah sejak abad ke-19 telah menarik perhatian dunia akademis karena banyak aspek yang terkandung di dalamnya amat bermanfaat bagi pemahaman sejarah, politik, bahasa, seni, dan kebudayaan masyarakat Nusantara. Surat-surat tersebut jelas merupakan salah satu sumber pribumi dari tangan pertama (*bronen*) yang amat bermanfaat bagi penelitian sejarah Indonesia dan perkembangan bahasa Melayu Nusantara di masa lampau. Sayangnya, sampai sekarang data penting itu masih dipandang sebelah mata oleh para peneliti di luar bidang ilmu filologi dan sastra Melayu klasik pada umumnya. Demikianlah, umpamanya, sumber-sumber pribumi berupa surat-surat kerajaan tersebut belum banyak dimanfaatkan dalam studi sejarah lokal Indonesia. Usaha untuk meneliti dan mentransliterasikan surat-surat tersebut, terutama yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan luar negeri, perlu ditingkatkan terus, agar isinya dapat diketahui oleh pembaca masa kini dan dapat dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian dalam bidang ilmu terkait.

Pada hakikatnya, surat adalah wakil diri seseorang. Oleh karena itu, dalam ungkapan Melayu klasik dikatakan bahwa “surat adalah pengganti badan”.⁴ Dengan demikian, ada rahasia-rahasia yang amat pribadi yang termaktub di dalamnya, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain selain si penerima surat. Namun, dalam kasus surat-surat kerajaan Nusantara di masa lalu, hakikat surat sebagai representasi diri/pribadi itu agak kompleks sifatnya. Ada urusan pribadi dan sekaligus peristiwa politik yang terekam di dalam surat-surat tersebut, dan sampai batas tertentu, teksnya bersifat emotif, tidak “kering” seperti laporan-laporan resmi penjajah. Surat itu sendiri adalah tradisi yang diserap oleh subjek jajahan dari penjajahnya: semacam peniruan (*mimicry*) yang diserap dan

dipelajari dari kekuatan *literacy* penjajah yang dengan selembat kertas yang disebut *surat* dapat mengambil alih dan meng-hilangkan kekuasaan si subjek terjajah atas tanah dan otoritas mereka atas rakyat dan negerinya sendiri.⁵ Surat-surat kerajaan Nusantara tersebut sering merekam peristiwa-peristiwa politik dan sosial, khususnya yang terjadi di sekitar lingkungan elite istana yang justru tidak terekam dalam laporan-laporan atau dokumen-dokumen Belanda. Dengan demikian, data historis yang berupa surat-surat kerajaan lokal Nusantara dan laporan-laporan resmi penjajah (Belanda) adalah dua jenis dokumen yang bersifat komplementer: yang satu dapat melengkapi yang lainnya. Surat-surat kerajaan lokal Nusantara itu adalah semacam “lorong waktu” (*time tunnel*) untuk masuk ke dalam istana-istana kerajaan lokal Nusantara pada masa lampau dan menyaksikan segala peristiwa (sosial dan politik) penuh dengan intrik yang terjadi di antara para penghuninya. Surat-surat itu merekam peristiwa-peristiwa politik mikro serta berbagai tradisi budaya dalam kerajaan-kerajaan lokal Nusantara itu—intrik-intrik politik, perubahan rezim, sistem birokrasi kerajaan, figur-figur politik penting di sekitar Sultan, perang lokal dan aksi makar, aktivitas ekonomi dan perdagangan, perilaku dan kebiasaan-kebiasaan pribadi para raja dan elite lokal, dan lain sebagainya. Banyak aspek kebudayaan Nusantara masa lampau yang dapat diungkap melalui penelitian terhadap surat-surat tersebut. Tidak berlebihan apabila pakar persuratan dan perstempelan Nusantara klasik, Annabel Teh Gallop, berkata bahwa surat-surat Melayu adalah “*an important resource for the study of political, diplomatic and economic history of the Malay world and for the historical development of the Malay language*” (Gallop, 1992:1).

Walaupun beberapa ahli sudah bertekun meneliti surat-surat Melayu dari berbagai aspek dan disiplin ilmu, masih ada banyak lagi surat klasik Nusantara yang belum dialihaksarakan dan belum diungkapkan isinya. Di dalam artikel ini saya membincangkan tiga surat raja Buton dari awal abad ke-19 yang tersimpan di Universiteitsbibliotheek Leiden (Perpustakaan Universitas Leiden; selanjutnya ditulis: UB

Leiden). Surat pertama dan kedua berturut-turut adalah **Cod. Or. 2242-II (15) [no. 246]** dan **Cod. Or. 2242-II (16) [no. 399]** atas nama **Sultan Dayyan Asraruddin**, sultan Buton ke-27 yang memerintah tahun 1799-1822. Surat ini ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (Wieringa 1998:415). Surat ketiga adalah **Cod. Or. 2233 (55)** atas nama Sultan Kaimuddin I, Sultan Buton ke-29, berkuasa tahun [1821]-1851. Surat ini ditujukan kepada Kolonel Jan David van Schelle, penguasa sipil dan militer Kompoeni di Makassar (*Ibid.*:303). Ketiga surat itu adalah bagian dari koleksi surat-surat resmi raja Buton yang tersimpan di Belanda dan, oleh karenanya, mungkin belum banyak diketahui di Indonesia. Penerbitan transliterasi ketiga surat tersebut diharapkan dapat menarik

perhatian kalangan akademis, khususnya di Indonesia, terhadap koleksi surat-surat raja Buton, dan naskah Buton pada umumnya yang beratus tahun tersimpan di luar negeri.

Surat-surat raja Buton yang tersimpan di UB Leiden

Salah satu dari sedikit perpustakaan di luar negeri yang menyimpan surat-surat raja Buton adalah UB Leiden, di kota Leiden⁶, Belanda. Di perpustakaan ini tersimpan delapan surat raja Buton (lih. Wieringa, 1998:303-15). Tabel berikut ini menyajikan informasi kolofon surat-surat tersebut.

Semua surat tersebut termasuk koleksi 'Rijks-Instelling' III di UB Leiden.⁷ Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa surat tertua ditulis tahun 1788 (surat no. 1) dan yang termuda

Surat-surat raja Buton yang tersimpan di UB Leiden

No	Kode naskah	Pengirim	Tarikh (H) / Konversi (M)	Diterima di Batavia
1	Cod. Or. 2242-II (3) [no.82]	Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur	22 Muharram 1203 / 23 Oktober 1788	23 Oktober 1788
2	Cod. Or. 2240-IIa (15) [no.81]	Idem	22 Muharram 1206 / 21 September 1791	9 Oktober 1792
3	Cod. Or. 2240-IIa (24) [no. 127]	Idem	8 Rabiulawal 1207 / 22 Oktober 1792	31 Oktober 1794
4	Cod. Or. 2240-IIa (38) [no. 171]	Idem	28 Rabiulakhir 1211 / 31 Oktober 1796	1 November 1796
5	Cod. Or. 2240-IIa (44) [222]	Idem	20 Rabiulakhir 1213 / 1 Oktober 1798	24 September 1799
6	Cod. Or. 2242 -II (15) [no. 246]	Sultan Dayyan Asraruddin	21 Jumadilawal 1216 / 29 September 1801	18 Oktober 1802
7	Cod. Or. 2242 -II (16) [no. 399]	Idem	6 Rabiulakhir 1217 / 6 Agust 1802	23 August 1804
8	Cod. Or. 2233 (55)	Sultan Kaimuddin I	1 Saper 1237 / 28 October 1821	kepada Kol. Van Schelle di Makassar

tahun 1821 (surat no. 8).⁸ Semua surat tersebut berbahasa Melayu dan ditulis dalam aksara Arab-Melayu (Jawi).⁹

Dalam beberapa katalog disebutkan bahwa ada satu lagi surat raja Buton yang tersimpan di UB Leiden, yaitu Cod. Or. 2240-II (9) (Wan Mamat, 1985:28; Wieringa, 1998:384-85). Namun, rupanya surat itu, yang termasuk jenis 'silver' letter, bukan surat raja Buton, melainkan

surat Sultan Abunasar Muhammad dari Banten bertarih 11 April 1807 (Pudjiastuti, 2005:173).¹⁰ Bahwa surat itu berasal dari Banten dapat diidentifikasi dengan jelas pada kolofonnya yang menyatakan 'kota Intan Surasupan [!]' (Wieringa, 1998:85)—yang dimaksud ialah *Surasuwan*—yaitu nama lain untuk Banten pada zaman dulu.

Lima surat yang pertama dalam daftar di atas, yaitu surat-surat Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur (surat no. 1, 2, 3, 4, 5), sudah dibicarakan oleh Suryadi (2006). Dalam artikel ini hanya akan dibahas tiga surat terakhir (surat no. 6, 7, dan 8). Dalam artikel ini akan diberikan gambaran mengenai konteks sosio-historis ketiga surat tersebut dan disajikan transliterasinya. Hasil transliterasi ini paling tidak akan membantu pembaca masa kini untuk mengetahui isi ketiga surat tersebut. Dalam kajian Suryadi (2007) belum sempat disajikan transliterasi tiga surat ini. Dengan demikian, artikel ini boleh dianggap sebagai lanjutan dari kajian itu, dalam rangka menyajikan transliterasi seluruh surat raja Buton yang tersimpan di UB Leiden. Selain akan menambah kepustakaan mengenai studi pernaskahan Buton, hasil transliterasi ketiga surat ini, dan lima surat terdahulu (*Ibid.*), diharapkan dapat dimanfaatkan oleh bidang ilmu terkait seperti linguistik dan sejarah.

MASYARAKAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN BUTON

Buton dalam ingatan banyak orang, khususnya di Indonesia, adalah negeri yang identik dengan aspal. Bahan pengeras jalan itu memang merupakan hasil tambang utama di Buton sejak zaman kolonial.¹¹ Namun, rupanya Buton memiliki sejarah yang panjang, lebih dari sekedar negeri penghasil aspal. Kesultanan Buton (atau Butun atau Wolio) dahulunya adalah sebuah kerajaan maritim yang berdaulat di Indonesia bagian timur (Yunus, 1995a; Zuhdi, 1999).

Wilayah Kesultanan Buton (121,40° dan 124,50° LS; 4,20° dan 6,20° BT) meliputi gugusan kepulauan di jazirah tenggara Pulau Sulawesi, yaitu Pulau Buton (di sini terletak kota Bau-Bau dimana istana kerajaan dibina), Pulau Muna (atau Woena atau Pancano), Pulau Kabaena, pulau-pulau kecil antara Pulau Buton dan Muna (yaitu Pulau Tiworo, Tikola, Tobeya Besar dan Tobeya Kecil, Makassar [Liwotu], Kadatua [Kadatowang], Masiring, Bata Oga, Siompu, Talaga Besar dan Talaga Kecil), Kepulauan Tukang Besi (terdiri atas

Pulau Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko), Poleang dan Rumbia di jazirah Sulawesi Tenggara, Pulau Wowoni, dan sejumlah pulau kecil lainnya yang terletak di sela-sela pulau tersebut yang tidak kelihatan di peta (*Encyclopaedie*, 1917:104-05; Zuhdi dkk., 1996:5; Yunus, 1995a:22).¹²

Cerita rakyat Buton menceritakan bahwa Kesultanan Buton didirikan oleh pendatang dari Johor dan Sumatra.¹³ Mereka disebut *mia patamiana* (empat orang), yaitu Sipajonga, Simalui, Sitamananjo, dan Sijawangkati (Yunus, 1995a: 17). Namun, ada juga yang mengaitkannya dengan Sawerigading, nenek moyang mitologis orang Bugis (Abidin 1968; Rasyid, 1998:1-5,75-79). Pada awalnya, Buton berbentuk kerajaan yang dikuasai oleh dinasti Ratu Wa Khaa Khaa¹⁴ yang belum memeluk Islam. Dinasti Ratu Wa Khaa Khaa mendirikan Kerajaan Buton kira-kira pada tahun 1332. Dinasti ini bertahan selama dua abad. Belakangan, setelah Islam masuk ke Buton, corak pemerintahan kerajaan ini berubah menjadi kesultanan. Hal itu dimulai pada tahun 1538 setelah rajanya yang keenam, Lakilaponto, memeluk Islam. Baginda disebut sultan pertama dengan gelar Sultan Kaimuddin 1 atau Sultan Murhum (Zuhdi dkk., 1996:11; Schoorl, 2003:[15]).

Kesultanan Buton adalah 'sahabat sejati' Belanda sejak zaman VOC sampai menjelang dibubarkan tahun 1960. Pada tahun 1613, Kapten Apollonius Scotte yang mewakili Gubernur Jenderal Pieter Both di Batavia mengikrarkan persekutuan abadi dengan Sultan Buton, La Elangi (lih. *Corpus Diplomaticum*, 1907:1^e deel, 104-08). Secara politis Buton selalau merasa terancam oleh dua kerajaan tetangganya, yaitu Gowa/Makassar dan Ternate yang selalu bersaing berebut pengaruh di kawasan timur Nusantara. Oleh karena itu, Buton perlu mencari sahabat yang kuat seperti Kompeni karena kerajaan itu berada di arena perebutan pengaruh antara dua kerajaan lokal tetangganya yang saling bersaing itu. Namun demikian, hubungan Buton-Belanda sering fluktuatif, terutama setelah runtuhnya VOC, karena Belanda cenderung makin mencampuri urusan dalam negeri Buton.

Penduduk Kerajaan Buton terdiri dari tiga kelompok etnis: 1) suku *Wolio* yang mendiami pulau Buton (pulau utama), bagian selatan dan Kepulauan Tukang Besi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya; 2) suku *Maronene* yang mendiami Pulau Muna, Kabaena, Buton bagian utara, Poleang, Rumbia di jazirah tenggara Pulau Sulawesi; 3) suku laut *bajoe* (*bajau*) yang mendiami pesisir pantai pulau-pulau Buton, Muna, dan beberapa pulau lainnya (Yunus, 1995a:23). Mayoritas masyarakat Buton beragama Islam. Corak pemerintahan sangat diwarnai oleh Islam dan Kesultanan diperintah berdasarkan prinsip-prinsip Islam (lih. Van den Berg, 1937; Yunus, 1995b; Niampe, 2002). Orang Buton memiliki semangat bahari dengan corak kebudayaan yang terkait dengan laut dan merupakan salah satu kelompok etnis perantau di Nusantara (Southon, 1995; Munafi dan Tenri, 2002; Tenri dan Sudirman, 2002).¹⁵

Masyarakat Buton lama terdiri atas empat lapisan sosial. Pertama, golongan *kaomu* atau *kaumu* (kaum ningrat), yaitu keturunan garis bapak dari pasangan raja pertama. Laki-laki dari golongan ini punya nama depan *La Ode* dan wanitanya *Wa Ode*. Kedua, golongan *walaka*, yaitu keturunan menurut garis bapak dari *founding fathers* Kerajaan Buton (*mia patamiana*). Mereka termasuk elite penguasa. Melalui sistem tertentu lelaki *kaomu* boleh menikahi perempuan *walaka*. Ketiga, golongan *papara* atau disebut juga 'orang gunung' (*Encyclpaedie*, 1917:16), yaitu anggota masyarakat biasa yang tinggal wlayah *kadie* (desa) dan masih merdeka. Mereka disebut juga *budak adat* (Schoorl 1986) dan dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tertentu di wilayah *kadie*, tapi sama sekali tidak punya akses kepada kekuasaan pusat. Keempat, golongan *babatua* (budak) dan berhak diperjual-belikan atau dijadikan hadiah.¹⁶ Selain itu, ada dua lapisan antara, yaitu *analalaki* dan *limbo*. Mereka adalah golongan *kaomu* dan *walaka* yang diturunkan derajatnya karena melakukan kesalahan sosial dan berlaku tidak pantas sesuai dengan status sosialnya (Schoorl, 2003:213-14).

Yunus (1995a:[v]) mengatakan bahwa berdasarkan struktur pemerintahannya wilayah

Kesultanan Buton terdiri atas tiga bagian. Pertama, wilayah *wolio* atau keraton yang menjadi pusat pemerintahan dan pengembangan Islam ke seluruh wilayah kesultanan. Wilayah *wolio* hanya boleh dihuni oleh golongan *kaomu* dan *walaka* (bangsawan). Kedua, wilayah *kadie* (wilayah di luar keraton, seluruhnya berjumlah 72 *kadie*) yang dimiliki oleh golongan penguasa dan dihuni oleh golongan *papara*. Ketiga, kerajaan-kerajaan kecil yang disebut 'wilayah *barata*', yang memiliki pemerintahan sendiri tapi tunduk di bawah kekuasaan pemerintah pusat setelah ditaklukkan.¹⁷

Kekuasaan di pusat dipegang oleh golongan *kaomu* dan *walaka* yang ber-kedudukan di Keraton *Wolio* di Bau-Bau. Mereka menjadi penguasa tertinggi untuk ketiga wilayah itu (*wolio*, *kadie* dan *barata*). Sultan sebagai penguasa tertinggi kerajaan dibantu oleh beberapa pejabat tinggi di pusat dan pejabat-pejabat di daerah. Secara umum, sistem birokrasi Kesultanan Buton sebagai berikut.

1. *Pangka* (atau pejabat teras (*rijksgroten*) atau dewan swapraja yang dijabat oleh golongan *kaomu* dan *walaka*, yang terdiri dari *Sapati* (*kaomu*); *Kenepulu* (*kaomu*); *Lakina Surowalio* (*kaomu*); *Lakina Baadia* (*kaomu*); 2 orang *Kopitalao*: *Kapitalao Sukanayo* dan *Matanayo* (*kaomu*)¹⁸, dua orang *Bonto Ogena* (menteri besar): *Bonto Ogena Sukanayo* dan *Matanayo* (*walaka*).
2. *Sarana* (Dewan) *Wolio* yang terdiri dari semua *bobato* (*kaomu*) dan *bonto* (*walaka*).¹⁹
3. *Siolimbona* (sembilan kepala wilayah pemerintahan daerah) dari golongan *walaka* yang sangat menguasai adat dan bertugas menjaganya.²⁰
4. *Sarana Hukumu*, yaitu badan yang mengurus dan mengawasi masalah-masalah yang berhubungan dengan ajaran Islam dan ibadah. Mereka adalah *lakina agama*, *imamu* (imam) dan *hatibi* (khatib), semua dari golongan *kaomu*.
5. Staf khusus kesultanan yang meliputi *Bonto Inunca* atau staf istana (*walaka*)²¹; *Bontona Lencina Kanjawari*, yaitu staf

khusus yang membantu tugas-tugas tertentu (termasuk di sini *Bonto Isana* dari golongan *walaka*); staf-staf lain, yaitu *Juruba[ha]sa (walaka)*²², *Kapita[lao]*, *Sabandara (Syahbandar) (kaomu)*²³ sebagai otoritas pelabuhan, *Talomboyang* membantu *Bonto Ogena* (menteri besar) sebagai penyampai maklumat dan pengumuman penting dari sultan, *pangalasan*²⁴ yang bertugas membantu *Bonto Ogena* dalam mengumpulkan pajak (*weti*).²⁵

Roda pemerintahan pusat sehari-hari dijalankan oleh *pangka* yang langsung dipimpin oleh Sultan sebagai otoritas tertinggi. Namun dalam urusan-urusan penting, antara lain diplomasi ke luar, unsur *bonto* dan *bobato* wajib diajak serta dan dibawa berunding. Hal ini terefleksi dalam surat-surat raja Buton yang tersimpan di UB Leiden (lih. Suryadi, 2007). Kesultanan Buton dihapuskan pada tahun 1960, tak lama setelah sultannya yang terakhir, La Ode Falihi, mangkat (Schoorl, 2003:212).

SI PENGIRIM SURAT: SULTAN DAYYAN ASRARUDDIN DAN SULTAN KAIMUDDIN I

Sultan Dayyan Asraruddin (1799-1822) naik tahta menggantikan Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur, Sultan Buton ke-26 (lih. Suryadi, 2007). Di dalam stempelnya tertulis *al-Sultan Dayyan Asraruddin ibn Abdullah. Allâhumma Mâlik al-mulk tu Ôtî al-mulk daÔîm bi dawâm al-bahir fî kull[al-]dahr madîd* (Gallop, 2002: part 2, vol. III, 499; lih. Ilustrasi 1). Catatan Zahari (1977:III, 21) tentang Sultan Asraruddin adalah sebagai berikut: Nama: La Badaru (nama lain: Badaruddin atau Oputa Lakira Agama Ana); Gelar kesultanan: Sultan Asraruddin; masa jabatan: 1799-1822; turun tahta dengan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dimakamkan di kompleks pekuburan ayah beliau dalam Benteng Keraton; aliran bangsawan Kumbewaha yang ke-7.

Peristiwa penting yang terjadi di masa kekuasaan Sultan Asraruddin adalah ditutupnya perjanjian dengan Kompeni di Makassar

pada 12 Januari 1804 (Ligvoet, 1878:87). Sultan Asraruddin tampaknya cukup kritis kepada Kompeni dibanding sultan sebelumnya (Muhyiuddin Abdul Gafur; lih. Suryadi 2007). Setelah membaca Cod. Or. 2242-II (14) [no. 246] di bawah terkesan bahwa Sultan Asraruddin agak kesal dengan sikap kapten dan awak kapal Kompeni yang kurang respek kepadanya serta tidak menghormati adat dan hukum yang berlaku di Buton. Namun demikian, Sultan tetap melaporkan kepada Kompeni jika ada kapal mereka yang mengalami musibah di perairan Buton (lih. transliterasi Cod. Or. 2242-II (16) [no. 399]. Sejarah mencatat bahwa walaupun hubungan Buton–Kompeni sering fluktuatif, hal itu tidak mengakibatkan terjadinya pemutusan total hubungan antara kedua pihak, sebab keduanya terikat pada “persekutuan abadi” yang diikrarkan oleh nenek moyang mereka dulu.

Di masa pemerintahan Sultan Asraruddin konstelasi politik Eropa juga mengalami perubahan signifikan: Inggris berperang dengan Perancis yang mau tidak mau juga melibatkan Belanda. Imbas perang itu sampai pula ke daerah-daerah jajahan mereka. Pada tahun 1811 Kompeni terpaksa menyerahkan Hindia Belanda kepada Inggris yang keluar sebagai pemenang perang dan baru pada tahun 1816 diserahkan lagi kepada Kompeni. Selama masa *interregnum* Inggris itu (1811-1816) hanya sekali utusan Buton menghadap wakil Inggris di Makassar (Ligvoet 1878:87). Berbeda dengan Belanda, Inggris kurang berminat mencampuri lebih jauh urusan politik internal kerajaan-kerajaan lokal Nusantara sejauh urusan dagang mereka tidak terganggu. Setelah Inggris pergi, hubungan Buton dan perwakilan Belanda di Makassar kembali aktif.

Pada tahun 1816 seorang bangsawan Bone, Arung Bakung, melakukan aksi makar di Barata Muna atas provokasi seorang ulama bernama Syarif Saleh. Arung Bakung mengawini putri Raja Tiworo sehingga ia cukup berpengaruh di Muna. Ia dan pengikutnya yang berasal Makassar dan Mindanao melakukan

aksi separatisme terhadap Bau-bau. Arung Bakung menjadi sempalan bagi Buton selama bertahun-tahun. Dalam aksi pemberontakannya, ia dilindungi oleh Raja Konawe dan Laiwui (Zahari 1977: III, 23). Pemberontak ini baru menyerah pada tahun 1824, dua tahun setelah Sultan Dayyan Asraruddin turun tahta.

Sultan Kaimuddin I naik tahta menggantikan Sultan Muhammad Anharuddin yang usia kekuasaannya sangat pendek (1822-1823).²⁶ Bahkan, ada kesan bahwa sebenarnya Sultan Anharuddin (Sultan Buton ke-28) seperti sultan *caretaker* sebab pada tahun 1821 Sultan Kaimuddin I, pengganti Sultan Anharuddin, sudah mengadakan hubungan resmi lewat surat dengan penguasa sipil dan militer Belanda di Makassar (Cod. Or. 2233 (55); lih. transliterasi),

sedangkan para sejarawan mencatat bahwa Sultan Kaimuddin I baru naik tahta tahun 1824. Menurut Zahari, nama biasa Sultan Kaimuddin I adalah Muh(ammad) Idrus; nama lainnya: Aedurusu Matambe, Mokobiadina, Oputa I Kuba, Oputa Mancuana; gelar kesultanan: Sultan Kaimuddin I; masa jabatan: 1824 [!]- 1851; meninggalkan kedudukan karena mangkat; tempat pemakaman: Badia, dekat Mesjid Sultan; aliran bangsawan: Kumbewaha yang ke-8 (Zahari, 1977: III, 28).

Gelar lengkap Sultan Kaimuddin I dalam stempelnya adalah: *al-Sultan Kaimuddin ibn Abdullah. Allâhumma Mâlik al-mulk tu Ôtî al-mulk daÔim bi dawâm al-bahîr fî kull [al-]dahr madîd* (Gallop, 2002: part 2, vol. III, 500; lih. Ilustrasi 2). Pada masa pemerintahan Baginda

D.59 #400; i.a

Buton

SULTAN DAYYAN ASRARUDDIN

r.1799-1822; 27th sultan of Buton; @ La Balaru (SdA 3.21)

السُّلْطَانُ دَيَّانُ اسْرَارُ الدِّيْنِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ

اللَّهُمَّ مَاكُ الْمَلِكِ تَوْنِي الْمَلِكِ دَائِمِ بِدَوَامِ النُّجُومِ فِي كُلِّ ذَهْرٍ مَدِيدٍ

al-Sultan Dayyan Asraruddin ibn Abdullah / Allâhumma Mâlik al-mulk tu Ôtî al-mulk daÔim bi dawâm al-bahîr fî kull [al-]dahr madîd

The Sultan Dayyan Asraruddin, son of Abdullah O "O God, Lord of Power (and Rule), 'You give Power" Quran 3:26) which lasts as long as there is light, throughout everlasting time'

Border: O read from O' anticlockwise facing inwards

Shape: circle, with a double-lined outline; 53 mm

1:26 3 impression(s); lampblack

RUL Cod.Or.2242.II.15

Letter to the Gen.-Gen., 21 Jumadilawal 1216 (29 September 1801)

Other examples: RUL Cod.Or.2242.II.16; ANRI Makassar 27146



Ilustrasi 1: Inskripsi stempel Sultan Dayyan Asraruddin (Sumber: Gallop, 2002: part 2, vol III, 499)

Kerajaan Buton mengalami kemajuan. Zahari (1977:III, 28-68)—yang banyak mengutip Ligvoet (1878), bahan-bahan lisan & tertulis dari La Adi Ma Faoka, dan memori Kapten De Jong (1916)—mengatakan bahwa nama Sultan Kaimuddin I dipakai karena terinspirasi oleh gelar Raja Belanda Willem I yang pada tahun 1835 memberikan penghargaan kepada Muhammad Idrus. Itu pula sebabnya Sultan Buton berikutnya—sultan ke-30 dan 31—yang merupakan anak-anak Muhammad Idrus diberi gelar Sultan Kaimuddin II dan Sultan Kaimuddin III, mengikut sistem penamaan Raja Belanda berikutnya: Kaisar Willem II dan Willem III. Ini menunjukkan bahwa di masa pemerintahan Sultan Kaimuddin I hubungan Buton – Kompeni sangat erat (*Ibid.*:34). Cod. Or. 2233 (55) setidaknya merefleksikan hubungan erat itu: Surat itu tampaknya dikirimkan oleh Sultan Kaimuddin I kepada Kolonel Jan David van Schelle yang baru diangkat sebagai pejabat sipil dan militer Kompeni di Sulawesi dan daerah-daerah

bawahannya, yang dipanggilnya sebaga “Duli Kekasih Hadirat Ayahanda Heer Gurnadur Tuan Besar di Mengkasar” (cetak miring oleh Suryadi).

Sultan Kaimuddin I yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat telah melakukan beberapa perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan Kerajaan Buton berdasarkan hukum Islam, menetapkan beberapa undang-undang baru yang mengatur hak dan kewajiban kaum nigrat dan masyarakat (*Ibid.*; Niampe 2002). Baginda juga mewajibkan penggunaan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan Keraton Wolio (*Op.cit.*:29). Ini tentu saja dilakukan dalam rangka konsolidasi kekuasaannya dan untuk penguatan kharisma lembaga kesultanan. Sultan Kaimuddin I juga banyak menulis buku untuk menambah pengetahuan masyarakatnya (Lihat daftar buku-buku karangannya dalam Zahari, *Ibid.*:29-30). Baginda juga menjalin hubungan regional yang lebih baik dengan kerajaan-kerajaan tetangganya.

D.001 #4022, Laj, mib, m
 Buton
 SULTAN KAIMUDDIN I
 r.[1821]-1851; @ Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin
 (Zahari 1977:3.28)

السُّلْطَانُ كَايْمُ الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ //

اللَّهُمَّ مَاكَ الْمَلِكُ تَوَكَّلْتُ عَلَىكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْمَلَكُوتِ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَعْلِيِّ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَعْلِيِّ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَعْلِيِّ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَعْلِيِّ

The Sultan Kaimuddin, son of Abdallah O TO God, Lord of Power (and Rule), You give Power" (Qur'an 3:26) which lasts as long as there is light, throughout everlasting time!

Border: A read from P anticlockwise facing inward

Shape: circle, with a single-ruled outline; 45 mm

326 2 impression(s); lampblack

RUL. Cod.Or.2233.55

Letter to Col. Van Schelle in Makassar, [1] Safar 1237 (28 October 1821)

Other examples: ANRI Makassar 368, p.506

Matrix: metal seal ring, with the handle set in modern wood

ms081

RNV



Ilustrasi 2: Inskripsi stempel Sultan Kaimuddin I (Sumber: Gallop 2002: part 2, vol III, 500)

CATATAN TRANSLITERASI

Berikut ini disajikan transliterasi (alih aksara) ketiga surat tersebut. Transliterasi ini mengikuti sistem transliterasi Arab-Melayu (Jawi) – Latin yang sudah umum, kecuali untuk kasus istilah atau nama Barat tertentu (Belanda), huruf ه dan ص masing-masing dipadankan dengan v dan c (misalnya *Raad van India* dan *Cornelis*, bukan *Raad fan India* dan *Kornelis*). Agar transliterasi itu dapat dibaca oleh pembaca umum, ia dibuat dengan tidak terlalu mengikuti aturan teknis filologis. Semua catatan kaki pada transliterasi dimaksudkan untuk dapat lebih menjelaskan hal-hal yang kurang jelas dalam transliterasi. Kata, frase, atau idiom yang berasal dari bahasa asing (Belanda dan Arab) yang agak khusus dicetak miring untuk pemunculan pertama (kecuali kepala surat) dan dijelaskan artinya dalam catatan. Pungtuasi adalah tambahan dari peneliti sebab dalam surat-surat klasik Nusantara yang ditulis dalam aksara Jawi tanda baca sangat jarang ditemukan. Pengalihaksara menambahkan tanda-tanda baca, yang maksudnya tiada lain supaya pembaca modern masa kini lebih mudah memahami isi surat-surat itu. Bagian yang dicetak tebal dalam transliterasi sesuai dengan surat aslinya. Peralihan antarbaris dalam surat aslinya tidak ditandai dalam transliterasi, supaya surat lebih kelihatan sebagai satu teks yang utuh yang tidak “dicincang-cincang” oleh peneliti. Penulisan kata ulang dengan memakai angka 2 dipertahankan. Tanda < > dalam teks transliterasi merujuk kepada adanya ditografi dan tanda { } menunjukkan adanya haplografi.

Banyak kata dalam surat-surat raja Buton mendapat tambahan fonem /h/ di belakangnya, misalnya kata *tuah* (untuk *tua*), *istanah* (untuk *istana*), *ayahandah* (untuk *ayahanda*), *Jawah* (untuk *Jawa*), dan *Walandah* (untuk *Walanda*). Ciri ini cukup umum ditemukan dalam tulisan-tulisan Jawi dalam masyarakat lokal di Indonesia timur yang termasuk rumpun bahasa Austronesia, seperti juga ditemukan dalam naskah-naskah Bima (Chambert-Loir, 2004:37). Menurut Chambert-Loir (*ibid.*), huruf *h* tambahan di akhir kata itu hanya varian ejaan Jawi dan tidak me-

ngandung nilai fonetik. Oleh karena itu, dalam transliterasi di bawah peneliti menghilangkannya. Kata-kata yang mendapat tambahan ekstra huruf *h* itu ditandai tanda garis bawah pada vokal yang mendahuluinya (misalnya *Ayahanda*, dst.). Berikut adalah transliterasi ketiga surat tersebut.

Cod.Or. 2242-II (15) [no. 246]

Surat Sultan Dayan Asrarudin kepada Gubenur Jenderal Hindia Belanda dan *Raad van Indië*

Qauluhu al-haqq,²⁷

Bahwa warkat al-ikhlas serta tabe banyak akan tanda harap dan percaya yaitu daripada Paduka Anakanda Sri Sultan Raja Buton dengan segala wazir menteri2nya, melayangkan kertas sekeping, datang ke bawah Hadirat Paduka Ayahanda Kompeni, Tuan *Her*²⁸ Gurnadur Jenderal dan Raden van India di Betawi, insya Allah Taala barang dilanjutkan usia umur zamannya, beroleh sehat dan walafiat dengan sejahteranya jua adanya.

Wabakdahu, kemudian daripadanya, bahwa barang maklum kiranya oleh Gurnadur Jenderal dan Raden van India di Betawi perihal adapun perahu kici nama M-w-r-b-t Filantroop [?] dan nama kapiten Jan Smit[h]²⁹ itu datang dari Ambon telah bersinggah kemari di Buton, dan serta ia bertemu dengan Sri Sultan, adalah mengatakan Kompeni dengan samanya Inggris, sudahlah habis perang. Sekarang itu³⁰ berdamai keduanya. Maka peri itulah Sri Sultan sehingga didengar saja lebih lagi hal ikhwal dalam hatinya melainkan telah sudah mendengar kepada **Gurnadur Jenderal** di Betawi. Maka baharu ia menyinggahkan serta menerima kasih. Demikianlah adanya. Seperkara lagi, Wilanda nama Kristiani³¹ pecah dari Sulu dan sekalian barang2nya sudahlah dirampas orang Sulu, hanya sendirinya dengan empat matros orang Jawa. Itulah didapatnya oleh rakyat Sultan, lalu dibawanya ke Buton dengan sebole2 memelihara serta memberi makan sehingga lagi menanti2 pula, atau supaya yang pergi ke Mengkasar maka baharu ia meng-

hantarkan adanya. Dalam itupun pada ketika Kapiten Jan Smit[h] datang kemari, ia pun itu³² menghendaki menempuh di situ, tiadalah sekali2 mau menanti2 Sultan punya perintah. Maka peritulah kalau diikutinya pula seperti demikian halnya karena pada semata Kompeni jua adanya. Dan lagi Sri Sultan telah adalah menghantarkan seperti buah2 kayu akan isi tanah Buton yang miskin daripada sebab demikian istiadat hormat Yang Maha Mulia yang telah biasa diperlakukan kepada zaman-zaman purbakala jua adanya.

Tersurat pada selikur hari bulan Jumadil-awal waktu hari Sabtu hijrat al-Nabi Salallahu [alaihi wasallam] seribu dua ratus enam belas tahun pada tahun Waw.³³

Cod.Or. 2242-II (16) [no. 399]

Surat Sultan Dayyan Asraruddin kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan *Raad van Indië*

Qauluhu al-haqq

Bahwa ini surat tanda cap nama Paduka Sri Sultan Raja Buton *Abbada Allâh malakahû wa sultânahû*³⁴. Syahdan, adapun inilah perihal daripada dua orang *Walanda* dengan seorang orang hitam dan kapiten itu bernama Cornelis telah pecah pada Pulau Tukang Besi, lalu datang dari Tanah Buton. Beberapa hari lamanya di Buton, *selup*³⁵ datang pada Labu[h]an Bandar Negeri Buton. Maka, menyuruh menumpang berkendaraan pada *selup*, hendak pergi berlayar di Betawi, akan nama *estirman*³⁶nya A-ltr-p³⁷ katanya baru singgah di Surabaya kemarin, lalu ia lantas di Betawi. Demikianlah jua adanya. Tamat *al-kalâm maa al-khayr ajmaîn*.³⁸

Tersurat di dalam Kerajaan Negeri Buton pada enam hari bulan Rabiulakhir pada hari

Sabtu di dalam hijrat al-Nabi Sal[allahi alaihi-wasaalam seribu dua ratus tujuh belas tahun pada tahun Alif.³⁹

Cod. Or. 2233 (55)

Surat Sultan Kaimuddin I kepada Kolonel Jan David van Schelle⁴⁰

Qauluhu al-haqq

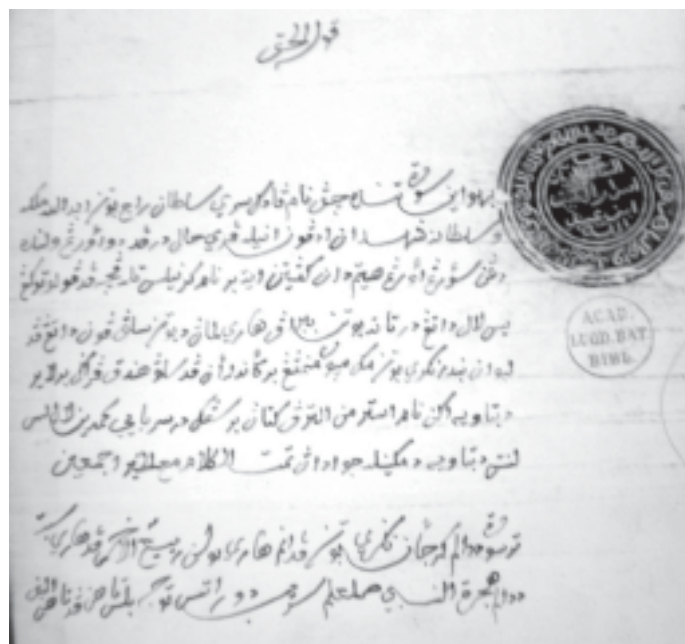
Bahwa ini *sahifat*⁴¹ serta kiriman diri sendiri dipesertakan dengan tabe banyak2 yang sempurna takzim dan *takrim*⁴², yaitu daripada Paduka Anakanda Sultan Kaim al-Din Raja Buton, mudah-mudahan disampaikan kiranya dengan sejahteranya ke bawah Duli Kekasih Hadirat Ayahanda **Heer Gurnadur** Tuan Besar yang memegang kuasa bicara di dalam Bandar Mengkasar, mudah-mudahan dilanjutkan hayat usia umur zamannya serta bertambah2 daulat kemuliaan dan adab kebesaran di dalam dunia ini, dengan selamat sekalian pekerjaannya. Amin *ya-rabbal alamin!*

Wabakdahu, kemudian daripada itu, maka adalah Anakanda Paduka Sri Sultan Raja Buton dengan segera melayangkan secarik kertas ini akan menerbitkan alamat al-hayat kepada Duli Kekasih Hadirat Ayahanda Heer Gurnadur Tuan Besar di Mengkasar, yaitu empat kayu kain daripada kain Buton dan seribu biji ubi. Apalah juga setitik [h]ujan yang terhambur daripada Hadirat Ayahanda jua adanya. Tamat *al-kalâm bi al-kahyr wa al-salâm*.⁴³

Tersurat dalam Negeri Buton pada awal bulan Safar di dalam hijrat Nabi Salallahu alaihi wassalam seribu dua ratus tiga puluh tujuh tahun, pada tahun Dal Awal. Sanat 1237.⁴⁴



Ilustrasi 3: Cod. Or. 2242-II (15) [no. 246]



Ilustrasi 4: Cod. Or. 2242-II (16) [no. 399]



Ilustrasi 5: Cod. Or. 2233 (55)

SIMPULAN

Sampai batas tertentu, isi ketiga surat di atas merefleksikan beberapa aspek dari kompleksitas hubungan politik, ekonomi, dan sosial antara Kesultanan Buton dan Belanda di masa lampau. Isi surat-surat itu juga mencerminkan sifat maritim kerajaan ini: para pelaut Buton, baik atas nama raja maupun sebagai penduduk biasa, sering menyelamatkan (yang dalam beberapa laporan Belanda juga dituduh merampok) awak kapal-kapal asing yang mengalami kecelakaan di laut di sekitar Kepulauan Buton. Oleh karena itu, juga mereka sering menjadi faktor pengikat persahabatan sekaligus pemicu konflik di kawasan itu. Sampai batas tertentu isi surat-surat tersebut juga merefleksikan hubungan pribadi Sultan-Sultan Buton dengan Kompeni. Walaupun Buton–Kompeni terikat “persekutuan abadi” sejak 1613, namun sejarah telah mencatat bahwa hubungan keduanya sering fluktuatif.

Isi surat-surat kerajaan Nusantara zaman lampau, seperti halnya juga tiga surat yang dibahas di sini, banyak mencatat peristiwa-peristiwa mikro yang terjadi di lingkungan elite istana, dengan raja atau sultan sebagai figur sentralnya. Surat-surat tersebut jelas sangat bermanfaat pula bagi studi sejarah lokal

Indonesia. Peristiwa-peristiwa historis yang terekam dalam surat-surat tersebut dapat memperkaya atau malah merevisi data-data dari sumber asing (baca: Barat). Melalui surat-surat itu para sejarawan juga dapat melihat bagaimana persepsi pribumi terhadap suatu peristiwa sejarah di masa lampau. Demikianlah umpamanya, arogansi kapten-kapten kapal Kompeni seperti Jan Smith di mata Sultan Buton yang disebut dalam Cod.Or. 2242-II (15) [no. 246] tentu tidak akan dapat ditemukan dalam laporan-laporan resmi Belanda.

Dari segi linguistik, aspek kebahasaan surat-surat yang dibahas dalam artikel ini tidak kalah menariknya. Bahasa dan tulisan surat-surat itu merepresentasikan dinamika Bahasa Melayu pada abad ke-18 dan 19. Banyaknya kosakata serapan yang terdapat dalam surat-surat itu – Bahasa Arab atau bahasa-bahasa Eropa – menunjukkan bahwa Bahasa Melayu, sebagai bahasa pemersatu masyarakat kepulauan Nusantara, sudah sejak lama bersifat terbuka. Sampai batas tertentu, bahasa surat-surat itu menunjukkan variasi dialek Bahasa Melayu Buton ragam tulis, yang jelas berbeda dengan yang ada di tempat-tempat lain di Kepulauan Nusantara.

Dengan selesainya transliterasi tiga surat yang dibahas dalam artikel ini, berarti seluruh surat Raja Buton yang tersimpan di UB Leiden sudah berhasil dialihaksarakan. Jadi, surat-surat raja Buton yang tersimpan di UB Leiden berasal dari tiga orang Sultan, yaitu: lima surat dari Sultan Buton ke-26, Muhyiuddin Abdul Gafur; dua surat dari Sultan Buton ke-28, Dayyan Asraruddin; dan satu surat dari Sultan Buton ke-30, Kaimuddin I. Diharapkan hasil transliterasi ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai masyarakat, budaya, bahasa, dan sejarah Buton. Pengalihaksaraan surat-surat dari kerajaan-kerajaan lokal lainnya di Nusantara tentu perlu terus digiatkan. Hasilnya tentu akan sangat bermanfaat bagi studi bahasa dan budaya lokal Indonesia.

Memanfaatan surat-surat klasik kerajaan Nusantara sebagai sumber pertama (*bronen*) belum membudaya dalam studi sejarah, khususnya di Indonesia. Hal ini selayaknya sudah harus berubah dalam tradisi studi sejarah kita. Kalaulah bukan karena kekaguman yang menyebarkan terhadap 'keabsahan' dan 'superioritas' sumber-sumber Barat, hal ini agaknya terkait juga dengan 'kekurangan' kurikulum sejarah kita dimana pengetahuan membaca huruf Arab-Melayu (Jawi) tidak pernah terpikirkan untuk diajarkan dalam bidang ilmu sejarah di negara ini. Mungkin tidak banyak sejarawan (kita) yang pandai membaca huruf Jawi. Ini yang menyebabkan kurangnya perhatian mereka kepada sumber-sumber pribumi yang ditulis dalam aksara Jawi, seperti surat-surat kerajaan Nusantara ini. Akan tetapi, walaupun seorang sejarawan tidak dapat membaca aksara Jawi, mereka sebenarnya dapat memanfaatkan transliterasi surat-surat tersebut yang telah dibuat oleh filolog dan peneliti naskah untuk memperkaya data mereka. Penggunaan surat-surat klasik kerajaan-kerajaan lokal Nusantara itu secara maksimal di samping sumber-sumber Barat mungkin akan dapat menghasilkan studi sejarah kolonial yang lebih bernuansa, emotif, dan humanis. Data sejarah yang berasal dari surat raja-raja Nusantara itu juga dapat mereduksi subjektivitas dan perasaan 'nasionalisme' yang kadang-kadang secara tak

sadar turut terefleksikan dalam studi sejarah (lokal) Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Andi Zainal. 1968. 'Mitos Asal Mula Kerajaan Buton' [Bau-Bau, stensilan].
- Ab. Karim, Ab. Razak bin. 1994. "Surat Sultan Temate 1521: Beberapa Analisis Linguistik". *Jurnal Dewan Bahasa* Jilid 38, Bil.1 (Januari 1994), hal. 66-74.
- Abdurrahman, Paramita R. 1980. "Kegunaan sumber-sumber Portugis dan Spanyol untuk penulisan sejarah Maluku Utara" dalam E.K.M. Masinambouw (ed.). *Halmahera dan Raja Ampat: Konsep dan strategi penelitian*, hlm.247-262. Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- Abdurrahman, Paramita R. 1983. "Maluku, Portugal, dan Spanyol; Hubungan antara Kerajaan Maluku dengan Kerajaan Portugal dan Spanyol dalam abad XVI dan XVII sebagaimana tersirat dalam surat-surat dan dokumen resmi". Dalam: E.K.M. Masinambouw (ed.). *Halmahera dan Raja Ampat sebagai kesatuan majemuk: Studi-studi terhadap suatu daerah transisi*. Jakarta: LEKNAS-LIPI [Buletin LEKNAS Vol. II, No.2, terbitan khusus], hal. 247-275.
- Anceaux, J.C. 1987. *Wolio Dictionary (Wolio-English-Indonesia) ; Kamus Bahasa Wolio (Wolio-Inggris I-Indonesia)*. Dordrecht & Providence: Foris Publication Holland.
- Anceaux, J.C. 1988. *The Wolio language: Outline of grammatical description and texts*. Dordrecht: Floris.
- Berg, E.J. van den. 1937. "De viering van den raraja hadji in de Kota Wolio (Boeton)". *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 77: 650-660.
- Berg, E.J. van den. 1939. "Adatgsbruiken in verband met de sultaninstallatie in Boeton". *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 79, hal. 469-528.
- Blagden, C. Otto.1930. "Two Malay letters from Temate in the Moluccas, written in 1521-1522". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 6, hal. 87-101.
- Boethe, A. CHR. D. 1928. "De asfaltgesteenten van het eiland Boeton, hun voorkomen en economische beteekenis". *De Ingenieur* Nr.19, hal. 27-45.
- Broersma, R. 1930. "Mededeelingen over de eilanden van het Sultanaat Boeton". Overdruk uit: *Koloniaal Tijdschrift* 1.19 Jrg. (1930), hal. 26-38.
- Chambert-Loir. 1985. "Dato' ri Bandang" *Légendes de l'islamisation de la region de Célèbes-Sud*. *Archipel* 29, hal. 137-163.
- Chambert-Loir, Henri. 2004. *Kerajaan Bima dalam sastra dan sejarah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (Naskah Dokumen Nusantara XIX).

- Corpus Diplomaticum*. 1907 & 1931. *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum; Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het oosten gesloten, van privilegebrieven aan hen verleend. Eenz.* (uitgegeven en toegelicht door Mr. J.E. Heeres). 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Drakard, Jane. 1999. *A Kingdom of Words: Language and power in Sumatra*. Shah Alam [etc.]: Oxford University Press.
- Elbert, Johannes, *et al.* 1911. "Südost-Celebes un Seine Inseltrabanten". In: *Die Sunda-Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main*, Band I, pp.137-274. Frankfurt AM Main: Druck und Verlag von Herman Minjon (Festschrift zur Feier des 75jährigen Bestehens des Vereins).
- Elbert, Johannes, *et al.* 1912. "Die Insel Kobaena". In: *Die Sunda-Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main*, Band II, pp.3-52. Frankfurt AM Main: Druck und Verlag von Herman Minjon (Festschrift zur Feier des 75jährigen Bestehens des Vereins).
- Encyclopaedie*. 1917. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, 1^e deel (A-G). 's-Gravenhage & Leiden: Martinus Nijhoff & N.V. v/h. E.J. Brill.
- Gallop, Annabel Teh. 1992. "The art of the Malay letter". [Paper presented at: International Workshop on Indonesian Studies no.7: Southeast Asian manuscripts, Royal Institute of Linguistics and Anthropology (KITILM), Leiden, 14-16 Desember 1992].
- Gallop, Annabel Teh. 2002. *Malay seal inscriptions: A study in Islamic epigraphy from Southeast Asia*, 3 vols. [PhD dissertation, SOAS University of London].
- Gallop, Annabel Teh. 2003a. "Bunga Setangkai" 'Merely a single, withered flower', or a clue to the antiquity of the Malay letter-writing tradition?. *Indonesia and the Malay World* Vol. 31, No.91, hal. 400-411.
- Gallop, Annabel Teh. 2003b. "Seventeenth-century Indonesian letters in the Public Record Office". *Indonesia and the Malay World* Vol. 31, No.91, hal. 412-439.
- Gallop, Annabel Teh and Ben Arps. 1991. *Golden letters: Writing traditions of Indonesia; Surat Emas: Budaya tulis Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lontar.
- Ikan, Achadiati dkk. 2002. *Katalog Naskah Buton: Koleksi Abdul Milku Zahari*. Jakarta: Manassa [etc.].
- Irchan, M. 1999. "Wa Ka Kha: Ratu Keraton Buton putrine Kubilai Khan; Laporan daerah". *Djaka Lodang* Vol. 29, no.17 (1999), hal. 48-49.
- Ikandar, Teuku. 1999. *Katalogue of Malay, Minangkabau, and South Sumatran manuscripts in the Netherlands*. Leiden: Documentatiebureau Islam-Christendom.
- Juynboll, H.H. 1899. *Catalogus van de Maleische en Sundanesche handschriften der Leidse Universiteit Bibliothek*, Leiden: E.J. Brill.
- Jusuf, Jumsari *et al.* 1980. *Katalog koleksi naskah Maluku*. Jakarta: Museum Nasional.
- Kato, Tsuyoshi. 1982. *Martiliny and migration; Evolving Minangkabau tradition in Indonesia*. Itaha, N.Y. [etc.]: Cornell University Press.
- Kielstra, E.B. 1908. "Het Sultanaat van Boeton". Overdruk uit: *Onze Eeuw* 8 Jrg. 1^e deel (1908), hal. 452-472.
- Kielstra, E.B. 1910. *Indisch Nederland: Geschiedkundige Schetsen*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Kurosaki, Hiroko Yamaguchi. 2007. "Naskah-naskah di masyarakat Buton; Beberapa catatan tentang keistimewaan dan nilai budaya". *Sari* 25, hal. 21-30.
- Ligvoet, A. 1878. "Beschrijving en geschiedenis van Boeton". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 26, hal. 1-112.
- Manarfa, La Ode. 1948. 'Boeton en haar standenstelsel'. [M.A. Thesis, Leiden University].
- Muhammad, Syahril. 2004. *Kesultanan Ternate; Sejarah sosial, ekonomi dan politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Mu'jizah. 2004. "Surat duka cita raja: Dari raja Buton tentang kematian raja Bone". [Makalah pada: Seminar Memperingati Hari Jadi Bone yang ke-674, Watampone, 20 Mei 2004].
- Munafi, La Ode Abdul dan Andi Tenri. 2002. 'Tradisi perantauan orang Buton (Suatu kajian strukturalisme)'. [Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau].
- Naim, Mochtar. 1979. *Merantau: Pola migrasi suku Minangkabau* (Penerjemah: Rustan St. R. Tinggi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Niarpe, La. 2002. "Surat wasiat Muhammad Idrus al-Buton (Sebuah penjelasan singkat)". Dalam: Hidayat Suryalaga (ed.), *Widyâdhana; Kenang-kenangan 70 tahun Prof. Dr. Hj. Partini Sardjono Pr.* Bandung: Manassa Cabang Bandung (Jawa Barat), hal. 213-242.
- Pudjiastuti, Titik. 2004. "Arsip dan naskah Buton yang tersimpan di Negeri Belanda". [Makalah pada Diskusi Ilmiah Naskah-naskah Buton, Bau-Bau, 5 Agustus 2004].
- Pudjiastuti, Titik. 2005. 'Surat sultan-sultan Banten: Kajian kodikologis, filologis dan historis'. [Laporan penelitian, The Toyota Foundation & Yayasan Coor Indonesia].
- Pudjiastuti, Titik. 2006. *Naskah dan studi naskah*. Jakarta: Akademia [Seri Kajian Filologi].
- Rasyid, Abd. 1998. *Cerita rakyat Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Reid, A. (ed.). 1983. *Slavery, bondage and dependency in Southeast Asia*. St. Lucia: University of Queensland Press.

- Reid, Anthony. 2000. *Charting the shape of early modern Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Schoorl, Pim (J.W.). 1986. "Power, Ideology and Change in the Early State of Buton". [Paper presented at: Fifth Dutch-Indonesian Historical Congress, held at Lage Vuursche, The Netherlands, 23-27 June 1986].
- Schoorl, Pim. 1993. "Butonese". In: Paul Hocking (ed.). *Encyclopedia of world Cultures Vol. V: East and Southeast Asia*, pp.66-69. Boston, Massachusetts: G.K. Hall & Co.
- Schoorl, Pim. 2003. *Masyarakat, sejarah, dan budaya Buton*. Jakarta: Djambatan.
- Shellabear, W.G. 1898. "An account of some of the oldest Malay MSS. now extant". *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society* 31, hal. 107-151.
- Southon, Michael. 1995. *The navel of the perahu; Meaning and values in the maritime trading economy of a Butonese village*. Canberra: Department of Anthropology, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University.
- Staden, Miriam van. 2000. *Tidore: A linguistic description of a language of the North Moluccas*. [PhD dissertation, Leiden University].
- Stapel, F.W.. 1941. *Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-Indië*. Den Haag: W.P. v. Stockum & Z.²
- Suryadi. 2004. *Syair Sunur: Teks dan konteks 'otobografi' seorang ulama Minangkabau abad ke-19*. Padang: YDIKM & Citra Budaya.
- Suryadi. 2005. "Some notes on official Malay letters from the 18th century Sultanate of Buton". [Paper presented at: Seminar Windows on the Malay world; Poetry Reading and Seminar on Malay-Indonesian Literature Navigating Convention in New Terrains: Writing in the 18th to Early 20th Centuries, IIAS Leiden, 20 October 2005].
- Suryadi. 2007. "Warkah-warkah Sultan Buton Muhyiuddin Abdul Gafur kepada Kompeni Belanda, koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden". *Sari* 25, hal. 125-216.
- Tetri, Andi dan Sudiman. 2002. 'Budaya Pasikamba dan semangat bahari dalam kehidupan orang Buton di Kepulauan Tukangbesi, Sulawesi Tenggara: Studi diakronik tentang simbolisme dalam pelayaran tradisional'. [Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau].
- Wan Marat, H.J. Wan Ali. 1985. *Katalog manuskrip Melayu di Belanda*. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.
- Wassing-Visser, Rita. 1995. *Royal gifts from Indonesia; Historical bonds with the House of Oranje-Nassau (1600-1938)*. Zwolle: Waanders.
- Westendorp Boerma, J.J. 1956. *Briefwisseling tussen J. Van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836. II. Brieven van Baud*. Utrecht: Kemink.
- Wieringa, E.P. 1996. "A Malay copyist of the General Secretariat at Batavia as teacher of the Dutch Chief of Staff in the early 1820s". *Indonesia Circle* 69, hal. 89-101.
- Wieringa, Edwin. 1998. *Catalogue of Malay and Minangkabau manuscripts in the Library of Leiden University and other collections in the Netherlands*, Vol. 1. Leiden: Legatum Warnerianum in Leiden University Library.
- Wilkinson, R.J. 1982. *A Malay-English dictionary (romanised)*. Mytilene: Salavopoulos and Kinderlis.
- Wojowesito, S. 2003. *Kamus umum Belanda - Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Yunus, Abd. Rahim. 1995a. *Posisi tasawuf dalam sistem kekuasaan di Kesultanan Buton pada abad ke-19*. Jakarta: INIS (Seri INIS XXIV).
- Yunus, Abd. Rahim. 1995b. "Nazariyyah Martabat Tujuh [The theory of 'Martabat Tujuh'] in the political system of the Buton sultanate". *Studia Islamika* Vol. 2, Issue 1, hal. 93-110.
- Zahari, A.M. 1977. *Sejarah dan adat fiy Danul Butuni [Buton]* 3 jilid. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Zuhdi, Susanto, G.A. Omorella dan M. Said D. 1996. *Kerajaan tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Zuhdi, Susanto. 1999. *Labu Rope Labu Wana; Sejarah Buton abad ke-17-18*. [Disertasi Universitas Indonesia].

- 1 Versi awal artikel ini dipresentasikan pada Seminar Internasional. Menggali Khazanah Kebudayaan Melayu di Sulawesi Tenggara, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Budaya dan Pariwisata Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 23 Juli 2007. Saya mengucapkan terima kasih kepada ketua panitia Seminar, Dr. La Niampe, yang telah mengundang saya sebagai salah seorang pembicara dalam seminar tersebut. Terima kasih juga kepada para peserta seminar yang telah memberikan komentarnya terhadap makalah saya dan juga kepada editor ahli Jurnal *Humaniora* yang telah memberikan catatan kritis terhadap draft artikel ini.
- 3 Kajian mengenai surat-surat Melayu dari bagian timur Nusantara, untuk studi filologi, sejarah, epigrafi dan linguistik justru lebih sering mengenai surat-surat dari Ternate. Sejumlah surat dari Ternate itu berasal dari periode yang lebih tua (awal abad ke-16). Ketuaannya inilah yang mungkin menjadi salah satu daya tarik bagi para filolog, epigraf, dan sejarawan untuk menelitinya, karena mengandung informasi historis tentang kont(r)ak politik yang lebih awal antara kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara dengan orang Barat. Tentang studi-studi mengenai surat-surat dari Ternate, lih. misalnya Blagden (1930: 87-101), Jusuf dkk. (1980), Abdurrachman (1980:247-62; 1983:247-75), Wassing-Visser (1995), Gallop & Arps (1991:39, 131), dan Gallop (2003a:400-11; 2003b:412-39). Terima kasih kepada Annabel Teh Gallop yang memberitahu saya beberapa rujukan ilmiah mengenai kajian terhadap surat-surat dari Ternate (email, 11 Mei 2005).
- 4 Seperti terefleksi dalam bait kedua Syair Sunur karangan Syekh Daud berikut: "Lamalah tuan dagang tinggalkan / Habislah tahun berganti zaman / Satupun tidak dagang kirimkan / Dikarang surat kaganti badan" (lih. Suryadi, 2004: 52) (Garis bawah oleh Suryadi).
- 5 Mengenai pemanfaatan kekuatan kata dan surat ini oleh kerajaan pribumi Nusantara, lihat misalnya studi yang menarik dari Jane Drakard (1999) yang menyangkut Minangkabau di pedalaman Sumatra.
- 6 Di Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Leiden juga tersimpan sejumlah naskah Buton dalam bentuk mikrofilm dan fotokopi, dalam bundel D Or. 854. Fotokopinya – yang meliputi naskah-naskah keagamaan, undang-undang, catatan administrasi penjara, dan juga surat-surat – banyak yang kabur dan sulit dibaca. Rupanya bundel itu dihibahkan oleh J.C. Anceaux kepada KITLV. Tak ada keterangan dimana naskah-naskah aslinya tersimpan, tapi besar kemungkinan almarhum Anceaux memperolehnya dari Buton (sangat mungkin dari koleksi Abdul Mulku Zahari) sebab ada penjelasan: "fotokopie betreffende het Sultanaatarchief". Johannes Cornelis Anceaux (1920-1988) pernah tinggal di Buton pada akhir 1940-an dan menulis beberapa karangan ilmiah tentang Bahasa Buton (lih. misalnya Anceaux, 1987,1988).
- 7 Riwayat naskah-naskah dari Koleksi 'Rijks-Instelling' bagian ketiga ini (1878) mengikut penjelasan Wieringa (1998:283) adalah sebagai berikut: "The 'Government Training College for Indian Civil Servants' (Rijks-Instelling tot Opleiding van Indische Ambtenaren) was founded in Leiden in 1864. In 1877 it was replaced in Leiden by a municipal institution which would continue to exist till 1891. The manuscript collection of the 'Rijks-Instelling' was transferred at several instances between 1871 and 1878 to the Library of Leiden University (Cod. Or. 1953-2055 [except Cod. Or. 1959, 2019 and 2025]) 2199, 2233 and 2229-2268".
- 8 Iskandar (1999:85-88) yang juga mendeskripsikan koleksi naskah Melayu di UB Leiden dan perpustakaan-perpustakaan lain di Belanda mencatat tidak ada surat-surat raja Buton yang lain selain dari delapan surat yang telah disebutkan di atas. Sedangkan Jilid ke-2 katalog yang disusun Wieringa, sebagai lanjutan dari Jilid 1 (1998) baru akan terbit bulan Juli 2007. Untuk mengetahui berapa pastinya jumlah surat-surat raja Buton yang tersimpan di UB Leiden, kita harus menunggu terbitnya Jilid 2 katalog susunan Wieringa tersebut.
- 9 Naskah-naskah Buton, termasuk jenis surat-surat, umumnya ditulis dengan aksara Jawi dalam Bahasa Wolio (bahasa utama di Kesultanan Buton) dan Bahasa Melayu (lih. Kurosaki, 2007).
- 10 Pudjiastuti (2005:173) mengatakan bahwa kekeliruan ini agaknya bermula dari Juynboll (1899) yang tidak dikritisi oleh penulis-penulis sesudahnya. Juynboll menyatakan bahwa Cod. [Or]. 2240 adalah 'verzameling van Maleische brieven van Celebesen de Molukken' (hal. 313).
- 11 Pada tahun 20-an insinyur Belanda menemukan potensi aspal di perut bumi Buton. Tentang temuan potensi aspal di Buton, lihat misalnya Boethe (1928).
- 12 Tentang kepastakaan klasik mengenai Kesultanan Buton, lih. antara lain Ligvoet (1878), Kielstra (1908), Elbert dkk. (1911, 1912); Broersma (1930), dan Van den Berg (1939).
- 13 Menurut Abidin (1968) kemungkinan mereka adalah imigran (perantau) dari Minangkabau. Sejarah mencatat bahwa beberapa orang imigran-ulama Minang – satu kelompok masyarakat yang berasal dari bagian tengah Pulau Sumatra yang terkenal karena tiga hal: menganut agama Islam, mempraktekkan sistem matrilineal, dan suka merantau (lih. Naim, 1979; Kato, 1982) – berperan dalam penyebaran Islam di sejumlah kerajaan lokal di Nusantara bagian timur. Yang terkenal di antaranya adalah Datuk Ribandang dan Datuk Patimang. Tentang peran Datuk Ribandang dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, lihat misalnya Chambert-Loir (1985).

- ¹⁴ Menurut cerita rakyat Buton, Ratu Wa Khaa Khaa konon ditemukan dari dalam bambu (Abidin, 1968). Mitos kelahiran seorang putri atau pangeran dengan motif seperti ini ditemukan juga di beberapa tempat lain di Nusantara. Namun ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Ratu Wa Khaa Khaa adalah putri Kubilai Khan dari Dinasti Mongol (lih. Ircham M., 1999:48-49).
- ¹⁵ Lebih jauh mengenai orang Buton, lih. antara lain Schoorl (1993:66-69).
- ¹⁶ Pelabuhan Buton adalah salah satu sentra perdagangan budak pada zaman lampau, seperti disebut-sebut oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen selepas ia berkunjung ke Buton tahun 1614. Lebih jauh tentang perbudakan di Buton, lih. misalnya Schoorl (2003:104-7, 111-19). Tentang perbudakan di Hindia Belanda, lihat misalnya Reid (1983; 2006: chapter 9, 181-216).
- ¹⁷ Kekuasaan barata di Kerajaan Buton meliputi empat wilayah yang masing-masing dipimpin oleh lakina barata dari golongan kaomu, yaitu: 1) Barata Muna, berpusat di Raha, di pesisir timur bagian tengah Pulau Muna; 2) Barata Tiworo, berpusat di Tiworo; 3) Barata Kalincusu yang berpusat di bagian timur pulau Buton; 4) Barata Kaledupa yang berpusat di Kaledupa (Yunus, 1995a:22). Barataharus membela Kesultanan Wolio melawan musuh-musuhnya. Lebih jauh mengenai kewajiban barata terhadap Kesultanan Wolio (Buton), lih. Schoorl (2003:92).
- ¹⁸ *Kapitalao* atau Kapiten Laut dalam Bahasa Melayu adalah jabatan panglima perang di Kesultanan Buton. Kata *matanayo* berarti "dari matahari terbit" dan *sukanayo* berarti "menuju matahari terbenam". Istilah itu dilekatkan kepada jabatan *kapitalao* dan *Bonto Ogena* untuk menunjuk wilayah-wilayah kerajaan di sebelah timur dan barat yang menjadi wewenang masing-masing (lih. Zuhdi dkk., 1996:28; Schoorl, 2003:82).
- ¹⁹ Semua bobato dan bonto diberi sebuah desa atau sebidang tanah dalam 72 wilayah kadie untuk diawasi. Semula jumlah bonto 30 orang dan bobato 40 orang. Namun, jumlah itu bertambah seiring dengan pemekaran wilayah kadie. Manarfa (1948:8) mencatat jumlah bobato 57 orang. Sembilan di antaranya disebut *siolipuna*, yang berarti sembilan negara kecil yang di bawah perintah seorang raja, yang membentuk sekutu asli (Schoorl, 2003:83). Dalam surat-surat raja Buton terefleksi bahwa bobato adalah salah satu unsur petinggi kerajaan yang selalu diajak serta dalam hubungan diplomasi antara Kesultanan Buton dengan kuasa luar (dalam hal ini Belanda). Istilah bobato, yang berarti pemimpin (manager), mungkin diadopsi dari sistem politik Kerajaan Ternate atau Tidore; dalam sistem politik Kerajaan Ternate, misalnya dikenal istilah bobato dunia dan bobato akhirat (Muhammad, 2004:9-51). Kata bobato adalah derivasi dari Bahasa Tidore *fato* yang berarti "mengatur" (to organize) (lih. Van Staden 2000: 530, 533).
- ²⁰ Mereka adalah Bontona Peropa, Bontona Baaluwu, Bontona Gundu 2, Bontona Barangkatopa (mereka disebut *patalimbona*, 'empat pemukiman'), Bontona Siompu, Bontona Wandailo, Bontona Rakia, dan Bontona Melai. Semua dijabat oleh golongan walaka (Schoorl, 2003:82; lih. juga Zuhdi dkk., 1996:30).
- ²¹ Anggota Bonto Inunca yaitu: Bontona Dete, Bontona Katapi, Bontona Waberongalu, Bontona Kalau, Bontona Wajo, Bontona Sumbamarusu, Bontona Litao, Bontona Tanailandu, Bontona alampa dan 2 orang Bontona Gampikaro (Sukanayo dan Matanayo). Kesebelas orang bonto ini bertugas menjaga istana dan mengawasi adat.
- ²² Jurubasa (Jurubahasa) bertanggungjawab kepada syahbandar (Schoorl 2003:126 [#8]). Dalam hubungan diplomatik antara Kerajaan Buton dan kuasa-kuasa luar (termasuk Belanda), peran jurubahasa tampaknya cukup penting, seperti dapat dikesan dari seringnya peran ini disebut dalam surat-surat Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur (lih. Suryadi, 2007). Seorang jurubahasa yang terkenal pada masa pemerintahan Sultan Muhyiuddin bernama Inci Ali (Ibid.:176, 215). Lebih jauh mengenai tugas-tugas jurubahasa di Kerajaan Buton, lih. Schoorl (2003:109-11).
- ²³ Menurut Manarfa (1948:7) jabatan kapita [lao] dan sabandara (syahbandar) termasuk pangka, sedangkan Van den Berg (1939) dan Zahari (1977) berpendapat sebaliknya. Seorang syahbandar membawahi sekitar 20-40 jurubahasa (Schoorl, 2003:126 [#8]). Salah seorang syahbandar Pelabuhan Buton yang terkenal pada paruh kedua abad ke-18 adalah Raja Kamilanta (Lih. Suryadi 2007:176). Jabatan syahbandar amat penting karena peran Buton sebagai pelabuhan transit bagi kapal-kapal dagang lokal dan asing yang berlayar dari pelabuhan-pelabuhan di bagian barat Nusantara (misalnya Surabaya dan Batavia) ke wilayah bagian timurnya (seperti Ternate dan Ambon). Di samping itu, jabatan ini penting, juga karena sumber nafkah orang Buton adalah perdagangan dan pelayaran dengan kepintaran yang cukup tinggi dalam membuat perahu dagang (Ligvoet, 1878:9). Namun, seperti di beberapa kerajaan lokal lainnya di Nusantara, jabatan syahbandar Buton juga termasuk kursi "basah" dan sarat dengan penyelewengan (Schoorl, 2003:103).
- ²⁴ *Pangalasan*—atau pangalasa menurut Van den Berg (1939:470)—adalah jurubicara di tingkat kadie dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton.
- ²⁵ Sistem birokrasi dan sistem politik Kerajaan Buton tampaknya cukup kompleks. Ada beberapa variasi dalam uraian mengenai hal ini oleh be **Ilustrasi 4**: Cod. Or. 2242-II (16) [no. 399] **Ilustrasi 4**: Cod. Or. 2242-II (16) [no. 399] **Ilustrasi 4**: Cod. Or. 2242-II (16) [no. 399] berapa pengkaji terdahulu. Lebih jauh

- mengenai sistem birokrasi Kesultanan Buton, lih. Zuhdi dkk. (1996:26-61), Yunus (1995a:31-7) dan Schoolr (2003:khususnya Bab 3 [hlm.73-134]), yang umumnya merujuk kepada sumber klasik Van den Berg (1939:469-528).
- ²⁶ Menurut Zahari (1977: III, 25-7) Sultan Anharuddin diturunkan dari kekuasaannya karena melakukan beberapa kesalahan dalam prosedur militer, antara lain dalam penumpasan bajak laut yang menyerang Pasar Wajo. Aksi penumpasan itu dipimpin oleh Muhammad Idrus, menantunya, yang kemudian menggantikannya menjadi Sultan dengan gelar Kaimuddin I. Zahari berspekulasi bahwa alasan pemberhentian Sultan Anharuddin sepertinya tidak kuat, “tetapi agaknya terkandung suatu rahasia pribadi dari Sultan Anharuddin terhadap anak mantunya [itu]” (Ibid.:26).
- ²⁷ Artinya: ‘Perkataannya benar’ (Lih. kepala surat-surat berikutnya).
- ²⁸ Dari bahasa Belanda heer (tuan). Selanjutnya ditulis seperti kata aslinya (dengan dua huruf e).
- ²⁹ Dalam arsip VOC NA 1. 04.02 7941 Ambon 3 105-106 melalui website TANAP ditemukan keterangan sebagai berikut: “1786 Berigt van den capitein en capitein luitenants ter zee Van der Golde, Kulk en Smith ten overstaan van den justitieelen officier waar bij deselve declareeren dat de gezaghebbers Jan Lievense en Christiaan Hendriks in anno 1783 goveord hebbende de chialoup de Batavier en de pantjalling de Beschermer vrij van pligtversuijm zijn dato 25 April 1786 (ontfanagen anno 1786)”. Dengan mempertimbangkan tarikh dokumen ini, mungkin saja capitain luitenant ter zee Smith (cetak tebal oleh Suryadi) yang disebut-sebut dalam dokumen itu adalah Jan Smith yang disebut dalam Cod. Or. 2242-II (15) [no. 246] ini. Lih. <http://www.tanap.net/>. Saya mengucapkan terima kasih kepada arkeolog maritime, Horst Liebner, yang telah memberitahukan kepada saya sumber ini.
- ³⁰ Kata itu dalam konteks kalimat ini menunjuk kepada subjek (Belanda dan Inggris). Ini mengingatkan saya pada keterangan Henri Chambert-Loir (2004: 38) yang mengatakan bahwa dalam naskah-naskah Bima kata itu juga berfungsi sebagai kata penunjuk untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang. Rupanya hal yang sama juga ditemukan dalam surat-surat raja Buton.
- ³¹ Mungkin yang dimaksud di sini adalah seorang Belanda yang bernama Christiaan. Walau bagaimanapun, nama ini disebut-sebut dalam Arsip VOC NA 1. 04.02 7941 Ambon 3 105-106 (Informasi yang saya terima dari Horst Liebner, email 16-6-2007) (lih. juga Catatan 28).
- ³² Di sini kata itu dipakai lagi untuk merujuk subjeknya (lih. catatan 29).
- ³³ 21 Jumadilawal 1216 = 28 September 1801. Jadi surat ini dikirim kepada Gubernur Jenderal Johannes Siberg yang berkuasa tahun 1801-1805 sebagai suksesor Petrus Gerardus van Overstraten (1796-1801) (lih. Stapel, 1941:72-3).
- ³⁴ Secara harfiah frase ini berarti: “Semoga Allah mengekalkan kekuasaan dan kerajaannya” (Kerajaan Buton).
- ³⁵ Dari Bahasa Inggris sloop, yaitu sejenis perahu atau sekoci (Lih. Wilkinson, 1932: vol. II, 417; Iskandar, 1984:1224).
- ³⁶ Dari Bahasa Belanda, stuurman, yang berarti jurumudi kapal (Lih. Wojowasito 2003:648).
- ³⁷ Nama ini belum berhasil diidentifikasi. Lihat tulisan Jawi-nya dalam Ilustrasi 4, baris keenam.
- ³⁸ Arti harfiah frase Arab ini: “Pembicaraan berakhir dengan baik semuanya”. Maksudnya, “Demikianlah surat ini, semoga mengandung kebaikan semuanya.”
- ³⁹ 6 Rabiulakhir 1217 = 6 Agustus 1802. Jadi, surat ini ditulis masih dalam periode pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Siberg (lih. Catatan 27).
- ⁴⁰ Kolonel Jan David Van Schelle (1782-1825) adalah seorang perwira menengah dalam jajaran militer Hindia Belanda yang amat berminat mempelajari Bahasa Melayu dan Aksara Jawi. Pada tahun 1819-1820 Van Schelle banyak dibantu oleh Ja’in Abdurrahman, seorang penyalin (copyist) pribumi yang bekerja di Algemene Secretarie, Batavia, untuk membuat salinan cerita-cerita dan surat-surat beraksara Jawi untuk bahan pelajaran dan latihan transliterasi baginya. Hasil-hasil transliterasi Van Schelle terhadap salinan-salinan surat Melayu yang dibuatkan Ja’in itu dapat dilihat sekarang dalam bundel Cod. Or. 2233. Pada tahun 1821 Van Schelle pindah tugas ke Makassar (lih. Westendorp Boerma, 1956:258; Wieringa, 1996). Tampaknya Cod. Or. 2233 (55) ini adalah ‘surat sambutan’ yang disertai buah tangan dari Sultan Kaimuddin kepada Van Schelle yang baru bertugas di Makassar.
- ⁴¹ Artinya: lembaran
- ⁴² Artinya: pemuliaan.
- ⁴³ Arti harfiah: Berakhir pembicaraan (kalam) dengan kebaikan dan keselamatan.
- ⁴⁴ 1 Safar 1237 H = 28 Oktober 1821. Pada waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal adalah Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen (lih. Stapel, 1941:80-1). Bandingkan dengan transliterasi surat ini oleh Pudjiastuti (2006:171-2).